

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Peran Kiai

1. Pengertian kiai

Kiai adalah orang yang memiliki ilmu agama Islam, amal dan akhlak yang sesuai dengan ilmunya. Menurut Saiful Ahyar Lubis menyatakan bahwa kiai adalah tokoh sentral dalam suatu pondok pesantren, maju mundurnya pondok pesantren di tentukan oleh wibawa dan kharisma sang kiai. Karena itu, tidak jarang terjadi, apabila sang kiai dalam salah satu pondok pesantren wafat, maka pondok pesantren tersebut merosot karena kiai yang menggantikannya tidak sepopuler kiai yang telah wafat.¹

Menurut Munawir Fuad Noeh menyebutkan ciri-ciri kiai diantaranya yaitu:

- a. Tekun beribadah, yang wajib dan yang sunnah
- b. Zuhud, melepaskan diri dari urusan dan kepentingan materi duniawi
- c. Memiliki ilmu akhirat, ilmu agama dalam kadar yang cukup
- d. Mengerti kemaslahatan masyarakat, peka terhadap kepentingan umum
- e. Mengabdikan seluruh ilmunya untuk Allah SWT, niat yang benar dalam berilmu dan beramal.²

Menurut Sayyid Abdullah bin Alwi Al-Hadad dalam kitabnya *An Nadhahud Diniyah* mengemukakan sejumlah kriteria atau ciri-ciri kiai diantaranya adalah: Dia takut kepada Allah, bersikap Zuhud pada dunia, merasa cukup (qona'ah) dengan rezeki yang sedikit dan menyedekahkan harta yang berlebih dari kebutuhan dirinya. Kepada masyarakat dia suka member nasihat, beramar ma'ruf nahi mungkar dan menyayangi mereka serta suka

¹ Saiful Ahyar Lubis, *Konseling Islam dan Pesantren*, (Yogyakarta: Elsaq Presss, 2007), h. 169.

² Munawir Fuad Noeh dan Mastuki, *Menghidupkan Ruh Pemikiran KH . Ahmad Siddiq*, (Jakarta: PT Gramedia Pusaka Utama, 2002), h. 102

membinmbing kearah kebaikan dan mengajak pada hidayah. Kepada mereka juga ia bersikap tawadhu', berlapang dada dan tidak tamak pada apa yang ada pada mereka serta tidak mendahulukan orang kaya dari pada orang miskin.³ Kiai juga disebut "elit agama" istilah elit berasal dari bahasa inggris "elite" yang juga berasal dari bahasa latin "eligere", yang berarti memilih. Istilah elit digunakan pada abad ke-17, untuk menyebut barang-barang dagangan yang mempunyai keutamaan khusus, yang kemudian digunakan juga untuk menyebut kelompok-kelompok sosial tinggi seperti kesatuan-kesatuan militer atau kalangan bangsawan atas.

2. Kiai Dan Kepemimpinan Pondok Pesantren

Kiai merupakan elemen yang sangat penting keberadaannya dan kedudukannya dalam pondok pesantren. Maka sudah sewajarnya pertumbuhan suatu pondok pesantren tergantung dengan kepribadian dari kiai itu sendiri. Sarana kiai yang paling utama adalah dengan cara membangun solidaritas yang tinggi antara kiai dan bawahannya (santrinya). Kiai sebagai orang yang memiliki pengetahuan dan keilmuan dalam bidang keagamaan, maka dari itu ia menjadi pemimpin bagi umat islam.⁴

Menurut asal usul istilah kiai dalam bahasa jawa dipakai untuk tiga jenis gelar yang saling berbeda, antara lain:

- a. Sebagai gelar bagi benda- benda yang dianggap keramat, sperti kiai garuda kencana, yaitu sebutan yang diberikan kepada kereta emas yang terdapat di keratin Yogyakarta.
- b. Gelar kehormatan untuk orang-orang tua pada umumnya.

³ Munawir Fuad Noeh dan Mastuki, *Menghidupkan Ruh Pemikiran KH . Ahmad Siddiq*, (Jakarta: PT Gramedia Pusaka Utama, 2002), h. 102

⁴ Mohammad Takdir, *Modernisasi Kurikulum Pondok Pesantren*,(Yogyakarta: IRCiSoD, 2018), h. 79-81.

- c. Gelar yang diberikan masyarakat kepada orang yang memiliki ilmu pengetahuan tentang agama Islam dan telah memiliki atau menjadi pengasuh pondok pondok pesantren serta mengajar kitab kitab klasik kepada santrinya.⁵

Menurut Abdurrahman Mas'ud memasukkan kiai dalam lima tipologi, yaitu:

- a. Kiai (ulama) yang mengonsentrasikan diri dalam dunia ilmu; belajar, mengajar, menulis, menghasilkan banyak kitab.
- b. Kiai yang ahli dalam spesialisasi bidang ilmu pengetahuan Islam, pesantren mereka biasanya dinamai sesuai dengan spesialisasi mereka, misalnya pesantren Al-Qu'an.
- c. Kiai karismatik yang memperoleh karismanya dari ilmu pengetahuan keagamaannya, khususnya dari sufisme.
- d. Kiai dai keliling. Yang perhatian dan keterlibatannya lebih besar melalui ceramah atau dai pada public dengan interaksi yang baik melalui bahasa retorika yang efektif.
- e. Kiai pergerakan. Karena skill dan kepemimpinannya yang yang luar biasa, baik dalam masyarakat maupun dalam organisasi sehingga menjadi pemimpin yang menonjol.⁶

Menurut C.G. Kusuma kemashuran pondok pesantren tidak terlepas dari didikan dan pengajaran kiai kepada santrinya. Kepemimpinan kiai di pesantren diakui sangat efektif untuk meningkatkan citra pesantren di masyarakat luas. Ketenaran pesantren biasanya berbanding lurus dengan peran kiai, terutama kyai pendiri pondok pesantren tersebut. Keduanya saling membutuhkan pesantren membutuhkan kiai sebagai simbol kepemimpinan, dan kiai membutuhkan pesantren sebagai tempat penegasan identitasnya sebagai pemimpin dan lembaga pendidikan agama Islam.

Dalam lembaga pendidikan formal terdapat kepemimpinan kepala sekolah dan dalam lembaga nonformal seperti pesantren terdapat kepemimpinan kiai. Masing-masing mempunyai corak, gaya, maupun metode tersendiri dalam menjalankan lembaga pendidikan yang di

⁵ Kompri, *Manajemen dan Kepemimpinan Pondok Pesantren*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), h. 171-172.

⁶ Abdurrahman Mas'ud, *Intelektual Pesantren Perhelatan Agama dan Tradisi*, (Yogyakarta: LkiS, 2004), H. 236-37.

pimpinnya. Gaya kepemimpinan merupakan ciri yang khas dalam mempengaruhi anak buahnya, apa yang dipilih pemimpin untuk dikerjakan, cara pemimpin bertindak dalam mempengaruhi anggota kelompok membentuk gaya kepemimpinannya.⁷

3. Peran Kiai Dalam Pondok Pesantren

Dalam UU Pesantren nomor 18 tahun 2014 pasal 27 menyatakan Bahwa:

1. Dalam rangka penjaminan mutu internal, Pesantren membentuk Dewan Masyayikh.
2. Dewan Masyayikh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kiai.
3. Dewan Masyayikh memiliki tugas paling sedikit
 - a. menyusun kurikulum Pesantren
 - b. melaksanakan kegiatan pembelajaran
 - c. meningkatkan kompetensi dan profesionalitas pendidik dan tenaga kependidikan
 - d. melaksanakan ujian untuk menentukan kelulusan Santri berdasarkan kriteria mutu yang telah ditetapkan, dan
 - e. menyampaikan data Santri yang lulus kepada Majelis Masyayikh.⁸

Menurut imam suprayogo peran kiai sebagai berikut:

- a. Sebagai pendidik
- b. Sebagai pemuka agama
- c. Pelayanan sosial
- d. Sebagai pengasuh dan pembimbing
- e. Sebagai guru ngaji⁹

⁷ Mulyasa, *Manajemen dan Kepemimpinan Kepala Sekolah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), h. 108.

⁸ Undang-Undang Pesantren Nomor 18 Tahun 2019 pasal 27

⁹ Imam Suprayogo, *Kyai dan Politik*, (Jakarta: 2017 : Rajawali pers) h. 4-5

B. Strategi Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan

Secara umum kondisi Lembaga Pendidikan Islam di Indonesia masih ditandai berbagai kelemahan salah satunya seperti Kelemahan Sumber Daya Manusia (SDM), manajemen dan dana. Selain itu, Lembaga Pendidikan Islam belum mampu mewujudkan masyarakat madani dan saat ini *out put* yang dihasilkan oleh Lembaga Pendidikan Islam tidak sesuai dengan keinginan masyarakat yang menyebabkan terjadinya kesenjangan antara lembaga Pendidikan Islam dengan masyarakat.¹⁰

Inilah bentuk lain dari tantangan yang dihadapi oleh Lembaga Pendidikan Islam. Hal ini harus diantisipasi sejak dini supaya Lembaga Pendidikan Islam tetap eksis di tengah-tengah persaingan seperti sekarang ini. Upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam mengantisipasi tantangan tersebut menurut Akmal Hawi adalah:¹¹

1. Mengembangkan Tradisi Ilmiah di Lembaga Pendidikan Islam

Lembaga Pendidikan Agama Islam (semisal pesantren) harus berupaya memadukan keunggulan sistem pesantren dengan sistem sekolah umum. Sebenarnya tidak semua tradisi yang ada di pesantren cocok untuk diterapkan di masa sekarang, dan tidak semua tradisi di pesantren ketinggalan zaman. Di masa sekarang ini, perlu diketahui bahwasahnya masih sangat banyak nilai dari tradisi pesantren yang masih cocok untuk diterapkan dan dikembangkan serta dipadukan dengan sistem pendidikan pada sekolah umum. Tradisi untuk mendalami ajaran agama dengan mengamalkannya dengan sungguh-sungguh, ketaatan dalam menjalankan ibadah, akhlak yang mulia, kemandirian, kesabaran, kesederhanaan, adalah nilai pendidikan yang jelas dijumpai di pesantren dan sulit dijumpai di sekolah umum.

¹⁰ Abudin Nata, *Paradigma Pendidikan Islam*, (Jakarta: Gramedia, 2001), hal. 178-180

¹¹ Akmal Hawi, *Kapita Selekta Pendidikan Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hal.50-52

Lembaga pendidikan sekolah umum telah banyak memberikan pengetahuan berupa sains, ketrampilan, kemampuan berpikir logis, rasional, kreatif, dinamis, dan bebas. Lembaga Pendidikan Islam (pesantren) seharusnya dapat tampil ke depan membuat peluang dengan memadukan keunggulan dalam bidang akhlak dan moral serta ketaatan menjalankan ibadah yang ada pada sistem pendidikan di pesantren dengan keunggulan, keterampilan, kreatifitas, dan sebagainya yang ada pada sekolah umum. Dengan demikian maka lulusan Lembaga Pendidikan Islam tidak hanya menguasai ilmu pengetahuan umum secara seimbang. Kemampuan dalam bidang bahasa Arab, Inggris, dan lain-lain, penguasaan dalam bidang komputer dan berbagai peralatan teknologi lainnya, kemampuan dalam bidang penelitian, serta pola-pola pikir inovatif yang memberikan rasa percaya diri kepada para lulusannya.

2. Mengaktifkan Setiap Komponen Kurikulum Supaya Berfungsi Lebih Maksimal

Menurut Abdurrahmansyah dan Muhammad Fauzi yang dikutip oleh Akmal Hawi, Dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan Islam, maka komponen kurikulum yang ada perlu diaktifkan secara maksimal sehingga dapat menjadi sarana yang dapat menjamin keberhasilan proses pendidikan. Adapun komponen strategis, komponen media dan komponen evaluasi. a) Komponen Tujuan, Komponen tujuan merupakan satu hal yang sangat penting dalam kegiatan pendidikan. Sebab tujuan merupakan komponen sentral bagi komponen-komponen lainnya. Tanpa tujuan yang jelas, maka *output* yang dihasilkan tidak sesuai dengan harapan. Adapun tujuan akhir pendidikan Islam pada b) Komponen Materi, Komponen materi adalah isi dan struktur program yang diprogramkan untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Materi yang dimaksud biasanya berupa bidang-bidang studi dan materinya diuraikan dalam bentuk topik atau bahasan, misalnya: IPA, IPS, Fiqih, Akidah Akhlak, Bahasa Arab, dan sebagainya. Dengan modal dasar berupa sikap keterbukaan, ketaatan, kejujuran, etos ilmiah, kerja keras dan belajar, maka materi yang

perlu di dalam kurikulum Islam sekurang-kurangnya adalah materi-materi pelajaran yang bersumber dari sumber pokok ajaran Islam yang mengandung motivasi untuk mengembangkan daya pikir dan daya zikir anak didik dalam proses belajar mengajar di Lembaga-Lembaga Pendidikan Islam. Metode mengiteprestasikan dalil-dalil *qathi'* dan *zhannidari* kandungan al-Qur'an perlu dipertajam pada pengembangan kreatifitas dan cara berfikir sistematis dan logika serta universal dan radikal (mendasar) yang mengacu kepada konteks tuntutan hidup modern masyarakat. c) Komponen Strategis, Strategis pelaksanaan kurikulum terdeskripsi dari cara yang ditempuh dalam melaksanakan pengajaran, penilaian dan pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan serta cara melaksanakan pengajaran terhadap kegiatan secara mikro. Cara dalam melaksanakan pengajaran mencakup baik cara dalam menyajikan setiap bidang studi termasuk metode mengajar dan alat pelajaran yang digunakan. Dalam proses pembelajaran seorang guru dituntut untuk memberikan strateginya. Strategi menunjukkan pada suatu pendekatan, metode dan peralatan mengajar yang digunakan dalam proses pembelajaran. Strategi harus harus dipahami dan dikuasai oleh guru, dan dalam pengaplikasiannya harus tepat dan akurat. Sebab dengan menggunakan strategi yang tepat dapat meningkatkan proses dan hasil pembelajaran. d) Komponen Media, Media merupakan sarana pendukung dalam proses pembelajaran. Media merupakan alat bantu yang memudahkan dalam menyampaikan materi kurikulum agar mudah dimengerti dan dikuasai oleh peserta didik dalam proses pembelajaran. Penggunaan media dalam proses pembelajaran merupakan suatu langkah yang dilakukan oleh seorang guru agar apa yang disampaikan kepada peserta didiknya dapat dimengerti dan diserap serta diterapkan oleh mereka. Ketetapan memilih media yang digunakan dapat merangsang siswa untuk belajar dan akan membantu kelancaran pencapaian tujuan pembelajaran. e) Komponen Evaluasi Konsep utama dalam evaluasi ialah bahwa evaluasi haruslah *terus menerus* dan *menyeluruh*. Terus menerus diterapkan dalam bentuk menyelenggarakan gerakan tes harian (posstest), tes

bulanan (formatif) dan tes akhir program (tes sumatif). *Menyeluruh* diterapkan dengan menyelenggarakan pengetesan yang ditujukan kepada seluruh binaan (kognitif, afektif, dan psikomotorik). Psikomotorik itu mencakup aspek keterampilan melakukan dan melakukannya dalam kehidupan (pengalaman). Evaluasi dilakukan untuk menilai sejauh mana hasil proses pembelajaran telah dicapai. Dan biasanya evaluasi ini berbentuk tes formatif dan tes sumatif. Tujuan utama evaluasi formatif ini sesungguhnya lebih besar ditujukan untuk menilai proses pengajaran. Sedangkan evaluasi sumatif ditujukan sebagai hasil belajar dalam limit waktu yang cukup lama, satu semester atau satu Tahun. Dan evaluasi ini dimaksudkan untuk menilai kemajuan belajar siswa seperti kenaikan kelas, dan lain-lain. Oleh karena itulah hendaknya evaluasi dilakukan dalam bentuk yang lebih objektif sehingga benar-benar dapat menunjang keberhasilan proses belajar mengajar, karena kebanyakan evaluasi dilakukan dengan cara yang tidak objektif dan tidak mendidik, misalnya membocorkan soal-soal ujian, membiarkan anak-anak mencontek, dan lain-lain.¹²

3. Meningkatkan Profesionalitas Guru

Sehubungan dengan peningkatan profesionalitasnya, guru memang dituntut untuk selalu mengembangkan dirinya baik yang mengenai materi pelajaran dari bidang studi yang menjadi wewenangnya maupun keterampilan guru. Tanpa belajar lagi kemungkinan resiko yang terjadi ialah tidak tepatnya materi pelajaran yang diajarkan dan metodologi mengajar yang digunakan. Seorang guru yang profesional menurut Abuddin Nata yang dikutip oleh Akmal Hawi paling tidak menguasai tiga hal, yaitu:¹³

- a. Menguasai bidang keilmuan, pengetahuan dan keterampilan yang akan ditunjukkannya pada murid, semuanya itu hanya dikembangkan dengan melakukan kegiatan penelitian, baik melakukan penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan. Sehingga ilmu

¹² Ahmad Tafsir, *Metodologi Pengajaran Agama Islam*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2002), hal. 94

¹³ Choirul Fuad Yusuf, *Kajian Peraturan Dan Perundang-Undangan Pendidikan Agama Pada Sekolah*, (Jakarta: Pena Cita Satria, 2008), hal. 130

pengetahuan yang diajarkan guru kepada peserta didik akan tetap *up to date*, aktual dan relevan dengan kebutuhan masyarakat.

- b. Memiliki kemampuan menyampaikan pengetahuan yang dimiliki secara efisien dan efektif. Untuk itu guru harus mempelajari ilmu keguruan dan ilmu pendidikan yang berkaitan dengan didaktika dan metodik serta metodologi pembelajaran
- c. Memiliki kepribadian dan budi pekerti yang mulia yang dapat mendorong para peserta didik untuk mengamalkan ilmu yang didapat dan agar para guru dapat dijadikan sebagai panutan.

4. Meningkatkan Pengelolaan

Sebagaimana yang tercantum pada daftar kelemahan yang dimiliki oleh Lembaga Pendidikan Islam yaitu lemah di bidang Sumber Daya Manusia (SDM), manajemen, dan dana, maka Lembaga Pendidikan Islam perlu memiliki kekuatan secara seimbang, yaitu kekuatan di bidang Sumber Daya Manusia (SDM), mulai dari tenaga pendidik yang unggul, pengelolaannya yang handal. Kemudian kekuatan dalam bidang manajemen yang didukung oleh peralatan teknologi canggih dapat mendukung efisiensinya kerja. Selanjutnya dalam bidang dana yang bersumber dari kekuatan lembaga itu sendiri. Misalnya, dana yang masuk dari sumbangan para siswa dapat dikelola menjadi modal kerja produksi sehingga lembaga tersebut memiliki sumber dana yang tetap. Jika kekuatan ini dapat dimiliki oleh Lembaga Pendidikan Islam, maka masa depan dunia pendidikan akan berada di tangan ummat Islam.¹⁴

5. Menyediakan Fasilitas Sarana dan Prasarana

Sarana dan Prasarana yang memadai merupakan salah satu prasyarat penting bagi terselenggaranya pendidikan yang baik. Dari segi sarana dan prasarana perlu diciptakan dan disediakan berbagai peralatan yang diperlukan untuk pengamalan ajaran agama, seperti tempat ibadah lengkap dengan peralatannya, bimbingan sholat berjamaah, menciptakan

¹⁴ Akmal Hawi, *Kapita Selekta...*, hal. 20

lingkungan agamais, pembudayaan tradisi ke Islaman, perayaan hari-hari besar Islam, apresiasi nilai-nilai keimanan dan ketakwaan dalam prakteknya yang aktual dan sebagainya. Dengan demikian, pada saat peserta didik berada dalam lingkungan sekolah akan merasakan suasana Islami. Dari penjelasan yang sudah diuraikan dapat ditarik kesimpulan bahwa jika semua yang dilakukan dalam upaya menghadapi tantangan Lembaga Pendidikan Islam dapat terwujud dan berhasil, maka dapat dipastikan masa depan akan dikuasai oleh umat Islam. Oleh karena itu madrasah atau pondok pesantren harus mampu meningkatkan kualitasnya menjadi unggul, baik dalam bidang tatanan moral maupun dalam bidang keilmuan.

C. Mutu Pendidikan

1. Mutu Pendidikan

Mutu pendidikan terdiri dari kata mutu dan pendidikan. Mutu dalam bahasa arab “artinya baik¹⁵”, dalam bahasa Inggris “*quality*” artinya mutu, kualitas”. Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia “Mutu adalah (ukuran), baik buruk suatu benda; taraf atau derajat (kepandaian, kecerdasan, dsb)”. Mutu adalah “*Bermutu*” digunakan dalam arti “bermutu baik” misalnya sekolah bermutu, atau pelayanan bermutu, dan lain-lain.¹⁶ Dengan demikian mutu adalah tingkat kualitas yang telah memenuhi atau bahkan dapat melebihi dari yang diharapkan. Secara umum, makna yang terkandung dalam ungkapan mutu, bukanlah hal yang baru bagi mereka yang terlibat dalam pemikiran dan pelayanan manajemen sistem umum atau secara khusus sistem pendidikan. Mutu merupakan kata kunci suksesnya bersaing dalam kinerja berusaha, termasuk dalam bidang pendidikan. Para ahli membuat pengertian dan definisi mutu beraneka ragam, namun definisi dari beberapa para ahli

¹⁵Adib Bisri dan Munawwir A. Fatah, *Kamus Indonesai-Arab Arab-Indonesia Al Bisri*, (Surabaya:Pustaka Progressif, 1999), hal. 19

¹⁶Suryadi, *Manajemen Mutu Berbasis Sekolah*, (Bandung: Sarana Panca Karya Nusa, 2009), hal. 21

tersebut memiliki pengertian yang hampir sama dengan pengertian yang lain. Walaupun para ahli tidak sependapat dengan pengertian mutu dalam arti yang sama sebagaimana yang dikemukakan oleh beberapa ahli sebagai berikut:

Menurut Tjiptono yang dikutip oleh Suryadi, mutu adalah suatu produk adalah paduan sifat-sifat produk yang menyamai atau melebihi kebutuhan dan harapan konsumennya, baik yang tersirat maupun yang tersurat.¹⁷ Sedangkan menurut Husaini Usman yang dikutip oleh Sofan Amri menyatakan bahwa mutu adalah tingkat keunggulan.¹⁸ Kemudian ada juga pengertian mutu menurut Crosby yang dikutip oleh Abdul Hadi dan Nurhayati menyatakan bahwa mutu ialah *conformanceto requirement*, yaitu sesuai dengan yang disyaratkan atau distandarkan. Suatu produk memiliki mutu yang telah ditentukan, standar mutu tersebut meliputi bahan baku, proses produksi, dan produk jadi.¹⁹ Berdasarkan definisi mutu diatas maka dapat disimpulkan bahwa mutu adalah gambaran dan karakteristik yang menyeluruh dari barang atau jasa yang berkenaan dengan mutu kecil maupun mutu besar, tersirat maupun yang tersurat gunanya untuk menunjukkan kemampuan dalam memuaskan kebutuhannya.

Sedangkan yang dimaksud dengan pendidikan dalam bahasa Arab biasa disebut dengan istilah *tarbiyah*, yang berasal dari kata kerja *rabba*.²⁰ Menurut istilah pendidikan adalah latihan mental, moral, dan fisik yang bisa menghasilkan manusia berbudaya tinggi maka pendidikan berarti menumbuhkan personalitas (keperibadian) serta menanamkan rasa tanggung jawab.

Dari sisi yang lain menurut Soegarda Poerwakawatja yang dikutip oleh Jalaluddin dan Abdullah Idi menyatakan bahwa Pendidikan dalam arti yang luas sebagai semua

¹⁷ Ibid, hal.23-24

¹⁸ Sofan Amri, *Peningkatan Mutu Pendidikan Sekolah Dasar dan Menengah*, (Jakarta: Presatasi Pustakaraya, 2013), hal. 17

¹⁹ Addul Hadis dan Nurhayati.B, *Manajemen Mutu Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2010), hal.85

²⁰ Moh. Roqib, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Yogyakarta:Lkis Printing Cemerlang, 2009), hal. 14

perbuatan dan usaha dari generasi tua untuk mengalihkan pengetahuan, pengalaman kecakapan dan keterampilanya kepada generasi muda, sebagai usaha menyiapkan generasi muda agar dapat memahami fungsi hidup, baik jasmani maupun rohani.²¹

Selain itu, Zakiah daradjat mengungkapkan bahwa pendidikan adalah ajaran yang berisi tentang sikap dan tingkah laku di masyarakat, menuju kesejahteraan hidup perorangan dan bersama, maka pendidikan adalah pendidikan individu dan pendidikan masyarakat.²² Berdasarkan uraian-uraian diatas tentang definisi mutu dan definisi pendidikan maka dapat disimpulkan bahwa mutu pendidikan adalah kualitas atau ukuran baik atau buruk proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia untuk mendekatkan diri kepada Tuhan melalui upaya bimbingan pengajaran dan pelatihan. Mutu di bidang pendidikan meliputi mutu *input*, proses, *output*, dan *outcome*. Input pendidikan dinyatakan bermutu jika siap berproses.

Oleh karena itu dalam konteks pendidikan, pendidikan dapat dikatakan bermutu apabila dapat memenuhi input, proses, output dan dampak. Umiarso dan Zazin (dalam Muin) mengemukakan bahwa pendidikan bermutu adalah merupakan pendidikan yang menunjukkan kemampuannya dalam memuaskan kebutuhan dari konsumen atau pelanggan pendidikan (santri, orangtua santri dan masyarakat). Dengan kata lain, lembaga pendidikan sebagai institusi jasa. Mutu pendidikan ialah kemampuan sebuah sistem pendidikan dasar, baik faktor pengelolaan, pembiayaan, sarana prasarana, maupun penilaian yang diupayakan untuk meningkatkan dan menghasilkan output yang sebaik mungkin, mutu pendidikan juga dapat ditunjukkan dari proses pembelajaran yang efektif dan efisien. Pada dasarnya mutu pendidikan adalah mencakup keseluruhan pendidikan mulai dari input(masukan), kemudian proses (Pembelajaran), hingga menghasilkan output (keluaran) pendidikan, untuk mencapai

²¹ Jalaluddin dan Abdullah Idi, *Filsafat Pendidikan*, (Depok: Rajawali Pers, 2018), hal. 8

²² Zakiah Daradjat, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2017), hal. 27

input, proses, output yang bermutu sangat dibutuhkan penerapan manajemen yang baik. Penerapan manajemen sebanding dengan mutu pendidikan, semakin baik manajemen yang diterapkan maka pelaksanaan program pembelajaran semakin efisien, yang berdampak pada peningkatan kualitas pendidikan.²³

2. Standar Mutu Pendidikan

Standar mutu pendidikan menurut Burton yang dikemukakan oleh Rambat Nur Sasongko menyatakan bahwa standar nasional pendidikan berfungsi menjamin dan mengendalikan mutu pendidikan nasional. Baik buruknya mutu pendidikan amat tergantung dari standar minimal yang diterapkan.²⁴ SNP mencakup delapan standar yang terdiri atas: (1) Standar Kompetensi Lulusan, (2) Standar Isi, (3) Standar Proses, (4) Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, (5) Standar Sarana dan Prasarana, (6) Standar Pengelolaan, (7) Standar pembiayaan, (8) Standar Penilaian pendidikan. Rincian dari delapan standar tersebut terdapat PP No. 19 Tahun 2005. Dengan demikian untuk lebih lanjut dan memahami beberapa standar pendidikan nasional maka akan diuraikan sebagai berikut:

a. Standar Kompetensi Lulusan

Standar kompetensi lulusan adalah mengatur tentang kriteria mengenai kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan untuk semua mata pelajaran pada satuan pendidikan.

b. Standar Isi

Standar isi mencakup lingkup materi minimal dan tingkat kompetensi minimal untuk mencapai kompetensi lulusan minimal pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Standar isi memuat kerangka dasar dan struktur kurikulum, beban belajar,

²³ Ara Hidayat, Imam Machali, *Pengelolaan Pendidikan (konsep, Prinsip, dan Aplikasi dalam Mengelola Sekolah dan Madrasah)*, (Badung, Pustaka educa, 2010), hal 324

²⁴ Rambat Nur Sasongko, *Efektivitas Implementasi Standar Nasional Pendidikan di Sekolah*, (Bengkulu: UNIB PRESS, 2018), hal. 10

kurikulum tingkat satuan pendidikan, dan kalender pendidikan, Dalam UU Pesantren nomor 18 tahun 2014 tentang Kurikulum pesantren pada pasal 10 Ayat 1 menyatakan bahwa kurikulum satuan pendidikan muadalah terdiri atas kurikulum keagamaan dan kerikulum pendidikan umum.²⁵

c. Standar Proses

Standar proses mencakup ketentuan tentang proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik.

d. Standar Tenaga Pendidik

Standar pendidik dan tenaga kependidikan meliputi pengaturan tentang kriteria minimal tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Dalam UU Pesantren nomor 18 tahun 2019 tentang pendidik dan tenaga kependidikan pesantren pada pasal 34 Ayat 3 menyatakan bahwa Kompetensi sebagai pendidik profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kompetensi ilmu agama Islam dan/atau kompetensi sesuai dengan bidang yang diampu dan bertanggung jawab.²⁶

e. Standar Sarana dan Prasarana

Standar sarana dan prasarana mengatur tentang kriteria minimal dalam sarana dan prasarana pendidikan. Setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana yang meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar

²⁵ Undang-Undang Pesantren Nomor 18 Tahun 2014 *kurikulum Pesantren* pasal 10 ayat 1.

²⁶ Undang-Undang Pesantren Nomor 18 Tahun 2019 *Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Pesantren* pasal 34.

lainnya, bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan. Dalam UU Pesantren nomor 18 tahun 2014 tentang sarana dan prasarana pasal 19 ayat 2 menyatakan bahwa selain standar sarana pendidikan, satuan pendidikan Muadalah wajib memiliki masjid dan kitab keislaman sebagai sumber belajar.²⁷

f. Standar Pengelolaan

Standar pengelolaan meliputi kriteria mengenai perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, kabupaten, provinsi, atau nasional agar tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan.

g. Standar Pembiayaan

Standar pembiayaan pendidikan meliputi kriteria tentang biaya investasi satuan pendidikan meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumberdaya manusia, dan modal kerja tetap. Dalam UU Pesantren nomor 18 tahun 2014 tentang pembiayaan pasal 26 ayat 1 menyatakan bahwa pembiayaan satuan Muadalah bersumber dari penyelenggara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, dan/ atau sumber lain yang sah.²⁸

h. Standar Penilaian

Standar penilaian pendidikan meliputi pengaturan tentang penilaian pendidikan pada jenjang pendidikan dasar terdiri atas: penilaian hasil belajar oleh pendidik, penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan, dan penilaian hasil belajar oleh pemerintah. Penilaian pada jenjang pendidik tinggi terdiri atas: penilaian hasil belajar

²⁷ Undang-Undang Pesantren Nomor 18 Tahun 2014 *sarana dan prasarana Pesantren* pasal 19 ayat 2.

²⁸ Undang-Undang Pesantren Nomor 18 Tahun 2014 *Pembiayaan* pasal 26 ayat 1.

oleh pendidik, dan penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan tinggi. Dalam UU Pesantren nomor 18 tahun 2014 tentang penilaian dan kelulusan pasal 24 ayat 3 menyatakan bahwa penilaian dalam satuan pendidikan sebagaimana dilakukan untuk menilai pencapaian kompetensi semua mata pelajaran dan kompetensi lulusan peserta didik disetiap jenjang satuan pendidikan Muadalah.²⁹

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat difahami bahwa standar mutu pendidikan berfungsi untuk menjamin dan mengendalikan mutu pendidikan nasional. Suatu lembaga pendidikan dapat dikatakan baik atau buruknya tergantung dari standar minimal yang diterapkan.³⁰

D. Pendidikan Pesantren

Istilah pesantren di Jawa dan Madura lebih dikenal dengan nama pondok. Istilah “pondok” berasal dari bahasa Arab funduq, yang berarti asrama.³¹ Sedangkan pesantren senantiasa disertakan dibelakang kata “pondok”, sehingga menjadi pondok pesantren. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Pesantren berarti, “tempat murid-murid belajar mengaji” Sedangkan pendapat lain mengatakan bahwa kata “pesantren” berasal dari kata dasar Santrimendapat walan pe dan akhiran an digabung menjadi pesantrian, yang mirip dengan kata pesantren yang mengandung makna sebagai tauhid. Terlepas dari asal-usul kata itu berasal dari mana, yang jelas ciri- ciri umum keseluruhan pesantren yaitu lembaga pendidikan Islam yang asli Indonesia, yang pada saat ini merupakan warisan kekayaan bangsa Indonesia yang terus berkembang. Bahkan pada Era millennium ini menjadi salah satu penyangga yang sangat penting bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Mengenai pengertian pesantren Zamakhsyari Dhofir berpendapat bahwa pesantren adalah sebuah asrama pendidikan Islam tradisional di mana siswa dan gurunya tinggal

²⁹ Undang-Undang Pesantren Nomor 18 Tahun 2019 *penilaian dan kelulusan* pasal 24 ayat 3.

³⁰ Pustaka Pelajar, *UU Sistem Pendidikan Nasional*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hal. 196

³¹ Sri Rahmaningsih dan Dayun Riadi, *Sejarah Pendidikan Islam*, (Rejang Lebong: LP2 STAIN CURUP, 2013), hal. 199

bersama-samaserta belajar di bawah bimbingan seorang guru “kiyai”. Serta terpenuhinya elemen-

elemen pesantren seperti: masjid untuk beribadah, ruangan untuk belajar dan kegiatan keagamaan dan sebagainya.³² Berdasarkan sosio-historis, pesantren sebagai lembaga pendidikan keagamaan yang telah berusia relatif tua lahir dengan tujuan untuk mengajarkan, menyampaikan dan mengembangkan nilai-nilai ajaran Islam sesuai dengan misi awalnya (tafaqquh fi al-din). Sedangkan Gus Dur dalam Rohani Shidiq mengemukakan, bahwa tujuan pesantren (sebagai inti dari Pendidikan Islam) adalah untuk mencetak kader guna mengabdikan kepada masyarakat sebagai pendidik agama dan mengembangkan kewiraswastaan, bukan generasi yang berorientasi menjadi pegawai. Tujuan pendidikan pesantren secara keseluruhan adalah mencetak kader guna mengabdikan kepada masyarakat. Kader berarti pula para penerus dan pewaris tanah air dan harus mau mengabdikan untuk kepentingan bangsa, kader yang mandiri dan mampu berdikari, baik secara ekonomi, sosial, budaya dan politik. Sedangkan ciri-ciri atau karakteristik pesantren adalah sebagai mana yang diutarakan oleh Samsul Nizar bahwa pesantren memiliki karakteristik yang berbeda dari lembaga pendidikan yang lain, diantaranya adalah:

1. Segi materi dan metode pengajaran

Pesantren pada mulanya, hanya mengajarkan materi agama. Adapun metode yang digunakan dalam pesantren ialah model wetonan, yakni metode dimana santri duduk disekeliling kiai, dan santri menyimak kitab dan juga mencatat jika ada yang perlu dicatat. Metode sorogan, yakni metode di mana santri menghadap kepada kiyai satu persatu dengan membawa kitab, metode ini dirasa paling sulit dibanding dengan metode yang lainnya.

2. Segi jenjang pendidikan

³² Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren*, (Jakarta: LP3S, 2015), hal. 23.

Dalam pesantren ditandai pada penguasaan dan pemahaman kitab-kitab klasik yang telah ditetapkan

3. Segi fungsi pesantren

Sebagai model pendidikan tertua di Indonesia Pesantren memiliki beberapa fungsi yang sangat fundamental diantaranya: lembaga pendidikan, lembaga sosial, dan lembaga penyiaran keagamaan.

4. Kehidupan santri dan kiyai

Berdirinya pesantren bermula dari adanya seorang kiyai yang menetap yang kemudian di ikuti oleh seorang santri yang ingin belajar dan juga bermukim bersama kiyai. Sedang biaya kehidupan dan pendidikannya ditanggung bersama oleh para santri dan dukungan dari masyarakat di sekitarnya. Hal demikian memungkinkan bagi pesantren untuk menstabilkan kehidupannya tanpa adanya pengaruh dari ekonomi di luar.

Ciri-ciri tersebut gambaran dari pesantren yang masih murni. Seiring dengan perkembangan zaman pesantren telah terdorong untuk melakukan perubahan terus menerus. Akibat dari perubahan tersebut, pesantren saat ini dibedakan menjadi beberapa bentuk. Menurut Zamakhsari Dhofir bentuk dan model pesantren dapat digolongkan menjadi dua yaitu pesantren salaf dan pesantren khalaf. Pesantren salaf yaitu pesantren yang pendidikannya tetap kokoh mempertahankan materi dan metode pengajaran klasik. Sedangkan menurut Samsul Nizar pesantren dapat digolongkan menjadi tiga bentuk diantaranya: pertama, pesantren tradisional, yaitu pesantren yang tidak mengalami transformasi atau inovasi dalam sistem pendidikannya. Kedua, pesantren tradisional, pada pesantren ini dalam pendidikannya telah memulai mengadopsi sistem pendidikan modern, hanya saja tidak secara keseluruhan. Ketiga, pesantren modern. Pesantren ini telah mengalami transformasi yang signifikan baik dalam sistem pendidikannya maupun unsur-unsur kelembagaannya. Dalam kaitannya dengan penelitian ini, peneliti memfokuskan pada model pesantren salaf atau

tradisional dalam mengkaji mutu pendidikannya, karena seiring dengan perkembangan zaman, pesantren salaf atau tradisional dituntut untuk mampu mengembangkan ilmu agama, dan menyinergikan dengan kemajuan ilmu pengetahuan modern sehingga nantinya lulusan pesantren dapat menjadi suri teladan bagi pengembangan tatanan kehidupan masyarakat yang religius dan Islami. Oleh karenanya, setiap penyelenggara pendidikan termasuk pendidikan pesantren adalah wajib hukumnya melakukan perubahan menuju peningkatan mutu pendidikan yang lebih baik, diharapkan akan terwujud suatu pendidikan pesantren atau madrasah yang bermutu, sehingga pesantren tetap akan mampu bersaing dalam mempertahankan konsistensinya dalam hal pendidikan dan tetap menjadi pilihan masyarakat.³³

³³ Herman, Herman. "Sejarah Pesantren di Indonesia." *Al-Ta'dib* 6, no. 2 (2013): 145-158.